

Mengalihkan Dana "Kunjungan Kerja" Parlemen

WALAU PUN men-
nuai berbagai kriti-
k publik, niat
anggota parlemen dalam me-
lakukan kunjungan kerja
(kunker) ke luar negeri, mi-
salnya ke Eropa dan Amerika
Latin, tetap dilakukan. Alasan
yang dilontarkan adalah da-
lam rangka penyusunan Ran-
cangan Undang-Undang
(RUU) dan merupakan kegi-
atan rutin yang dilakukan
oleh hampir semua anggota
parlemen.

Sebenarnya, banyak cara
bagi parlemen untuk mencari
bahan-bahan dalam meru-
muskan suatu regulasi perun-
dangan yang efektif dan
efisien dan tidak berke-
san menghamburkan anggar-
an negara. Cara paling mu-
dah tentunya dapat mengun-
dang para pakar negeri sendi-
ri yang memahami kultur
dan budaya bangsa sendiri.
Parlemen juga dapat melaku-
kan konsultasi publik dengan
masyarakat, akademisi, dan
stakeholder sebagai pendu-
kung dalam rancangan regu-
lasi perundangan. Tidak saja
harus melakukan kunker
yang ujungnya hanya pelerin-
an. Ibarat duta wisata dengan
embel-embel parlementaria.

Kunker juga dipandang ti-
dak ada urgensinya, ketika
hal itu dilakukan ke negara
yang memiliki karakter dan
kultur yang jauh berbeda de-
ngan budaya Indonesia. Con-
toh, kunker ke Brasil untuk
mendapatkan bahan pembas-
ahan RUU Perdesaan, yang



Dadang Iskandar

Dosen Kopertis IV Jabar Banten
dpk FKIP Unpas Bandung

jelaz-jelas negara tersebut
tidak mengenal musyawarah
mufakat. Padahal, alternatif
lain telah ada di dalam negeri
sendiri. Banyak pula hasil
dari penelitian akademisi
yang sesuai dengan karakter
bangsa. Bukankah suatu per-
undangan dibuat harus se-
suai dengan kultur dan bu-
daya sendiri, dan bukan
mengadopsi dari neraga lain,
yang belum tentu sesuai de-
ngan karakter bangsa ini.

Sebagai pejabat negara,
parlemen seharusnya mem-
peruntukkan penggunaan
APBN kepada yang lebih
penting, sebab sepeser pun
dalam penggunaan APBN
adalah unsur pajak yang di-
pungut dari keringat rakyat.
Wajar, jika publik mengkritik
parlemen soal kunker ini, di
samping kurang transparan
dan bermanfaat.

Adanya usulan pember-
hentian sementara (*moratori-
um*) kunker parlemen ke luar
negeri perlu diapresiasi. Ter-
lebih menjelang akhir tahun
fiskal, ada kebiasaan untuk
menghabiskan anggaran di
akhir tahun. Kebiasaan ini
perlu dihilangkan. Demi ke-
maslahatan bangsa dan ne-
gara. Kalau melihat studi ka-

sus yang lalu-lalu, kunker
yang dilakukan oleh Badan
Kehormatan (BK) DPR soal
"studi etik" ke Yunani, sama
sekali tidak menampakkan
hasil istimewa ketika diapli-
kasikan dalam regulasi Ko-
de Etik dan Tatib BK DPR
yang sebelumnya bersikukuh
dikatakan bahwa Yunani me-
rupakan sumber dari ilmu
etika dan gudangnya filsuf
modern.

Selain itu, kunker yang di-
ikuti oleh delapan Baleg DPR
ke Denmark dan Turki juga
menuai kritik pedas, hanya
untuk mencari perbandingan
sebagai bahan RUU PMI yang
akan mengubah logo apakah
tetap palang merah atau di-
ganti bulan sabit merah, sam-
pai menghabiskan anggaran
sebesar Rp 1,3 miliar. Di sini
diperlukan aturan tertulis
yang lebih jelas dan setiap
fraksi agar selektif terkait de-
ngan soal substansi yang
berbau wisata parlemen.

Sebelumnya, Pansus Otoritas
Jasa Keuangan (OJK)
mengirimkan beberapa tim
berkunjung ke empat negara,
yakni Inggris, Jerman, Je-
pang, dan Korea dalam ran-
ga penyusunan RUU yang
sedang digodok Komisi IX

DPR, hanya untuk melihat
pengawasan terhadap sistem
perbankan.

Konotasi negatif publik ter-
hadap kunker parlemen salah
satu indikasi bahwa anggota
parlemen dinilai telah kehi-
langan *sense of crisis*. Nam-
un, tetap melakukan agen-
da dalam penyusunan RUU
diselipkan kunker dan selalu
diizinkan oleh pimpinan
DPR. Ke depan perlu diatur
mekanisme dan akuntabili-
tasnya dan mengubah tatib
parlemen yang memungkin-
kan membawa keluarga da-
lam kunker.

Sangat boleh jadi para
pimpinan DPR tak memiliki
kewenangan untuk melarang
anggota parlemen melakukan
kunker ke luar negeri, karena
sejak awal tatib telah dibuat
sedemikian rupa, sehingga
kelonggaran anggota parle-
men memungkinkan untuk
melakukan hal serupa yang
telah dimaklumi oleh semua
fraksi yang ada di parlemen
sebagai mana diatur dalam
Undang-Undang Nomor
27/2009 tentang MPR, DPR,
DPD, dan DPRD (UU MD3).

Semua fraksi sama-sama
pernah melakukan hal seru-
pa. Tak ada pihak yang dapat
membatalkan kunker selama
alasan yang dipakai legal dan
tidak melanggar UU. Namun,
secara moral munculnya su-
ara sumir membuktikan bah-
wa kunker telah berkesan
pemborosan anggaran. Sa-
yang, hingga saat ini, parle-
men tak begitu merespons

terhadap aspirasi publik soal
kunker seakan "mati rasa."

Dari catatan yang ada, vo-
lume kunker terus mengala-
mi peningkatan. Sementara
perjalanan kunker tersebut
hanya beberapa yang diung-
gah ke publik. Bahkan hasil-
nya, tak ada korelasi positif
antara kinerja legislasi dan
hasil kunker.

Pada akhirnya, apa yang
dilakukan parlemen kurang
mendapat respons dari rak-
yat. Coba saja lihat, mulai
rencana pembangunan ge-
dung DPR yang mewah, dana
aspiratif, fasilitas, dana ke-
pentingan parlemen sendiri,
kunker dianggap tidak aspi-
ratif dan melukai hati rakyat
kecil, karena tak sebanding
oleh penilaian publik akan
kinerjanya.

Apa yang dikritisi publik
tidak salah. Publik hanya
melihat dari sisi luar ketika
perilaku dan tugas parlemen
dalam membuat keputusan
perundangan dianggap telah
membawa aspirasi publik.
Namun, bisa saja tidak, bah-
wa aspirasi itu hanya dalam
perspektif parlemen sendiri.
Wajar, jika tuduhan sesumir
sering dialamatkan terhadap
parlemen. Pembiaran parle-
men tanpa inisiatif perubaha-
n, dikhawatirkan akan men-
dorong parlemen ke dalam
rasa frustrasi dan antipati
masyarakat. Selain itu, inter-
vensi publik memperkuat
resonansi dan memperbesar
skala perubahan di parle-
men.***